

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (UU No. 7 tahun 2004).

DAS Sekampung merupakan salah satu DAS besar di Provinsi Lampung, dengan luas 484.181,80 hektar, dan sejak tahun 1984 telah ditetapkan sebagai DAS **super prioritas** untuk dikelola dengan baik, namun hingga kini DAS Sekampung masih tetap rusak (Banuwa, 2008). Padahal DAS ini sangat penting artinya bagi masyarakat Lampung, karena terdapat fasilitas strategis yang telah dibangun, seperti Bendungan Batutegi lengkap dengan PLTA dan Bendungan Argoguruh.

Kerusakan DAS Sekampung Hulu diawali oleh kerusakan hutan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, khususnya untuk budidaya tanaman kopi tanpa tindakan konservasi tanah dan air (Banuwa, 2008).

Akibat penggundulan hutan dan usahatani tanpa konservasi tanah dan air, saat ini telah dirasakan berbagai kerugian, diantaranya adalah areal sawah irigasi yang direncanakan dapat diairi seluas 66.573 ha, hanya terealisasi seluas 46.300 ha (69,5%) (Nippon Koei Co.Ltd, 2003 dalam Banuwa, 2008). Rencana sumber air baku PDAM sebesar 2.250 l/detik untuk beberapa kota belum terealisasi, dan PLTA berkekuatan (2 x 14 MW) baru terealisasi 50% (BP Proyek Induk Pengembangan WSS, 2003). Selain itu pada setiap musim hujan terjadi banjir di bagian tengah dan hilir DAS dengan genangan berkisar antara 0,5 m – 1,5 m (BRLKT WSS, 2000 dalam Banuwa, 2008).

Indikasi kerusakan sumber daya hutan di DAS Sekampung Hulu adalah tingginya laju erosi, yaitu sebesar 52,5 - 451,7 ton/ha/tahun pada lahan dengan kemiringan lereng > 15%, padahal erosi yang dapat ditoleransi hanya sebesar 38,7 ton/ha/tahun (Banuwa, 2008). Akibat langsung dari besarnya erosi adalah rendahnya produktivitas lahan pertanian. Hal ini terlihat dari rendahnya produktivitas tanaman utama di daerah tersebut, yaitu Kopi (137-345 kg/ha), Lada (120-327 kg/ha), Pisang (5,49 ton/ha), dan Kakao (544,4 kg/ha) (BPS Tanggamus, 2005), padahal potensi hasil kopi dapat ditingkatkan menjadi 1,0 ton/ha, lada menjadi 1,2 ton/ha, pisang menjadi 20 ton/ha, dan kakao menjadi 1,0 ton/ha (AAK, 1980, 1989). Akibat langsung dari rendahnya produktivitas lahan di DAS Sekampung Hulu menyebabkan rendahnya pendapatan petani sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Selain itu, erosi dapat menimbulkan sedimentasi dan penurunan kualitas sumber air. Sumber air di waduk batutegei telah tercemar gulma air (*kiambang*

dan *eceng gondok*). Gulma yang menutup permukaan air akan membuat kadar oksigen dalam air menjadi rendah, biota air tidak berkembang, dan meningkatkan penguapan sehingga volume air waduk menjadi berkurang.

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa status lahan di kawasan DAS Sekampung hulu didominasi oleh hutan lindung, yaitu seluas 34.885 ha (85%), sisanya seluas 7.515 ha (15%) merupakan lahan budidaya. Pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung di kawasan DAS Sekampung hulu dilakukan oleh kelompok-kelompok petani hutan kemasyarakatan (HKm). Di Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, terdapat 7 (tujuh) Gapoktan HKm, 4 (empat) Gapoktan diantaranya telah memiliki izin usaha pemanfaatan HKm dari Menteri Kehutanan, sedangkan sisanya belum memiliki izin. Luas garapan yang dikelola Gapoktan HKm seluas 14.548 ha dan melibatkan 3.315 anggota masyarakat (Tabel 1).

Tabel 1. Kelompok HKm Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus

No	Nama Gapoktan	Ketua	Lokasi	Luas (ha)	Anggota (orang)	Domisili Anggota
1	Bina Wanajaya I	Suharno	Datar Lebuay	1.591	414	Air Nainingan
2	Bina Wanajaya II	Setia Budi	Datar Lebuay	1.219	308	Air Nainingan
3	Mandiri Lestari	Sariwan	Datar Lebuay	1.478	235	Air Nainingan
4	Hijau Makmur	Sunarjoyo	Sinar Jawa	1.262	404	Sinar Jawa
5	Sidodadi	Suratman	Sinar Jawa	2.214	392	Sinar Jawa
6	Sinar Harapan	Sapturi	Datar Lebuay	5.031	471	Sinar Jawa
7	Mahardika	Alamudin	Sidomulyo	1.753	1.091	Air Nainingan
Jumlah				14.548	3.315	

Sumber: Sekretariat UPT Kehutanan, Dinas Hutbun Kabupaten Tanggamus (2011)

Dari 7 (tujuh) Gapoktan pengelola HKm, Gapoktan HKm Hijau Makmur menunjukkan kinerja lebih baik daripada Gapoktan lainnya. Hal ini terlihat dari dinamika Gapoktan dan kekompakan pengurus dan anggotanya (lebih dari 50% anggota hadir pada setiap pertemuan rutin tiga bulanan) dan memiliki daya adaptasi partisipan terhadap inovasi baru dan lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya.

Peran kelembagaan masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan sebagai daerah tangkapan air, karena sebagian kawasan hutan sering dijadikan lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sekitar hutan (Sylviani, 2006)

Kelembagaan pengelolaan sumberdaya hutan dapat berjalan dengan baik apabila adanya koordinasi di antara para pengelola sumberdaya hutan. Pengelolaan sumberdaya hutan di DAS Sekampung Hulu melibatkan beberapa pihak diantaranya (1) Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, (3) Kelompok tani HKm, (4) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) kecamatan Air Nanningan, (5) Lembaga Swadaya Masyarakat, (6) Polisi Kehutanan, dan (7) Kelompok Masyarakat lainnya. Banyaknya lembaga yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di DAS Sekampung Hulu dapat menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing lembaga cenderung lebih mementingkan sektornya daripada konservasi dan fungsi sosialnya.

Demikian juga pengelolaan sumberdaya hutan di tingkat pengelola hutan kemasyarakatan. Kinerja sumberdaya hutan di tingkat kelompok hutan kemasyarakatan sangat ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara karakteristik sumberdaya manusia di dalam kelompok, tingkat penerapan teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan, dan kelembagaan kelompok yang mengatur pola hubungan antar partisipan (anggota kelompok) dalam menggunakan teknologi yang tersedia untuk mengelola sumberdaya hutan, serta faktor lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakat yang berada di sekitar kelompok hutan kemasyarakatan tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa daya adaptasi partisipan terhadap faktor lingkungan dan teknologi pengelolaan hutan serta aturan main yang ada (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Juklak, dan Juknis) beragam. Ada yang baik yang ditunjukkan oleh kondisi hutan yang baik dan berfungsi, ada juga yang buruk yang ditunjukkan oleh kondisi hutan yang buruk pula. Inovasi kelembagaan oleh kelompok pengelola hutan kemasyarakatanpun masih terbatas karena rendah dan lemahnya bimbingan/pendampingan. Kalaupun ada bimbingan/pendampingan namun tidak berjalan secara berkelanjutan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa kondisi sumberdaya hutan di lingkungan DAS Sekampung Hulu telah rusak, laju erosi dan sedimentasi tinggi, produktivitas lahan rendah, dan telah terjadi penurunan kualitas sumberdaya air. Awal kerusakan diduga karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian untuk budidaya tanaman kopi tanpa tindakan konservasi lahan dan air. Pengelolaan hutan lindung dilakukan oleh kelompok tani HKM, salah satunya

adalah Gapoktan HKm Hijau Makmur, Kecamatan Air Nanning, Tanggamus. Oleh karena merubah sumberdaya manusia sangatlah sulit dilakukan maka melalui rekayasa kelembagaan (pengaturan di dalam batas yurisdiksi, hak kepemilikan, mekanisme pengambilan keputusan kelompok dan *enforcement*) diharapkan kinerja pengelolaan sumberdaya hutan menjadi lebih baik sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan lingkungan.

Oleh karena itu, penelitian tentang Analisis kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di DAS Sekampung hulu sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian terdahulu, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan Hijau Makmur
- 2) Bagaimana pengaruh perubahan kelembagaan terhadap performa Gapoktan Hijau Makmur
- 3) Kelembagaan bagaimanakah yang diperkirakan sesuai untuk menghasilkan performa yang diharapkan pada Gapoktan Hijau Makmur

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Memperoleh pengetahuan hubungan antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Nanning, Tanggamus

- 2) Memperoleh pengetahuan tentang pengaruh perubahan kelembagaan terhadap performa Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus.
- 3) Mendapatkan alternatif kelembagaan yang diperkirakan sesuai untuk menghasilkan performa yang diharapkan pada Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Naningan, Tanggamus.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- 1) Petani pengelola HKm dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya hutan.
- 2) Pemerintah sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan di DAS Sekampung Hulu.
- 3) Peneliti lain sebagai bahan pembandingan terutama untuk penelitian sejenis.
- 4) LSM, Perguruan Tinggi, dan Balitbang Pengkajian dan Penerapan Teknologi untuk pengembangan penguatan kelembagaan HKm

C. Kerangka Pemikiran

DAS Sekampung Hulu telah mengalami kerusakan berat. Hal ini terlihat pada tingginya laju erosi, yaitu rata-rata sebesar 163,70 ton/ha/tahun, yang menyebabkan (1) sedimentasi sebesar 9,1 juta ton/tahun, (2) degradasi lahan (produktivitas tanaman rendah), dan (3) pencemaran sumber air sungai dan waduk (banyaknya gulma air di sungai dan waduk).

Kerusakan DAS Sekampung Hulu diawali oleh kerusakan hutan akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, khususnya untuk budidaya tanaman kopi tanpa tindakan konservasi tanah dan air (Banuwa, 2008).

Beralihnya fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian berakibat buruk bagi perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Air hujan yang seharusnya tertahan/tersimpan dalam hutan lindung, terlepas begitu saja mengikuti aliran permukaan menuju ke tempat yang lebih rendah, akhirnya ke sungai, karena tajuk tanaman dan perakaran tanaman sudah berkurang bahkan tidak ada sama sekali (hutan gundul). Akibatnya terjadi banjir dan erosi, jika musim penghujan dan kekeringan, jika musim kemarau. Pemanfaatan dan penggunaan hutan lindung di kawasan DAS Sekampung hulu dilakukan oleh kelompok-kelompok petani Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Salah satu kelompok pengelola HKm adalah Gapoktan Hijau Makmur. Dipilihnya Gapoktan Hijau Makmur karena memenuhi kriteria kelembagaan, yaitu domisili keanggotaan berdekatan, lahan garapan berdekatan, dan hak kepemilikan terdokumentasi. Selain itu keanggotanya lebih kompak (lebih dari 50% hadir setiap pertemuan rutin tiga bulanan) dan lebih responsif terhadap inovasi baru (saat ini seluruh anggota kelompok akan menanam karet sebagai tanaman utama).

Gapoktan Hijau Makmur terdiri dari 5 (lima) kelompok tani yang kinerja lingkungan sumberdaya hutannya beragam, mulai dari yang buruk (jelek/rusak) hingga yang baik (bagus). Kinerja sumberdaya hutan per kelompok sangat ditentukan oleh interaksi antar partisipan, teknologi, dan kelembagaan di sekitar kelompok satu dengan faktor lingkungan. Dalam jangka pendek amatlah sulit

untuk merubah karakteristik partisipan dan teknologi, terlebih faktor lingkungan; perubahan (rekayasa) kelembagaan diharapkan mampu menghasilkan keragaan lingkungan sumberdaya hutan yang lestari. Rekayasa kelembagaan kelompok HKm berarti perubahan pengaturan dalam batas yurisdiksi, kepemilikan dan mekanisme pengambilan keputusan dan *enforcement* yang *compatible* dengan karakteristik partisipan dan lingkungan dapat menghasilkan kinerja sumberdaya hutan yang baik dan lestari.

Perubahan kelembagaan akan direspon oleh partisipan dalam bentuk perilaku anggota dan organisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan performa sumberdaya hutan yang baik (memenuhi persyaratan ekologi, ekonomi, dan sosial).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka **preskripsi** yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat hubungan yang kuat antara kelembagaan, perilaku, dan performa Gapoktan Hijau Makmur, Kecamatan Air Nanningan, Tanggamus, dalam situasi wilayah kerja yang tidak memiliki hambatan alamiah (*natural barrier*) dan tidak ada permasalahan jarak tempat tinggal (*social distance*).
- 2) Sistem kelembagaan yang dapat menjamin kelestarian sumberdaya hutan secara berkelanjutan adalah sistem kelembagaan yang secara ekonomi menguntungkan, secara sosial diterima masyarakat, dan secara ekologi dapat dipertanggungjawabkan, serta mampu mengontrol karakteristik sumberdaya hutan.